
**PERJANJIAN KERJA ESELON I
KEPALA BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG RI**

**TAHUN
2024**



**BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
By Pass Cempaka Putih Timur - Jakarta Pusat 10510
Telp. 021-2907 9177 Fax. 021-2907 9274
website: bawas.mahkamahagung.go.id

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN
KEPALA (ESELON I)
BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sugiyanto

Jabatan : Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Dwiwarso Budi Santiarto

Jabatan : Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 25 Januari 2024

Pihak Kedua,

Ketua Kamar Pengawasan MA RI

Dwiwarso Budi Santiarto

NIP. 196203141986121001

Pihak Pertama,

Kepala Badan Pengawasan MA RI

Sugiyanto

NIP. 196711241992121001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BADAN PENGAWASAN

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase penanganan pengaduan tepat waktu	90%
		Persentase hukuman disiplin yang dipublikasikan	100%
		Persentase laporan hasil pemeriksaan kasus yang tepat waktu	95%
2	Terselenggaranya pengawasan internal dan eksternal yang efektif dan efisien	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti	80%
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti	90%
		Persentase laporan hasil pengawasan yang tepat waktu	80%
3	Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	138 LHP
		Jumlah Pengadilan yang dilakukan pemeriksaan audit kinerja	62 LHP
		Jumlah Pengadilan yang dilakukan probity dan audit pengadaan barang dan jasa	23 LHP
		Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	92 LHE
		Jumlah Consulting yang terlaksana	3 Kegiatan
		LO (<i>Liaison Officer</i>) yang terlaksana	4 Kegiatan
		Analisa Kebijakan & Administrasi Penanganan Pengaduan	8 LHK
4	Terselenggaranya dukungan teknis administratif secara efektif dan efisien	Jumlah dokumen perencanaan dan keuangan yang tersusun	66 Dokumen
		Jumlah dokumen urusan penataan dan ketatalaksanaan yang tersusun	96 Dokumen
		Jumlah dokumen urusan tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan yang tersusun	110 Dokumen
		Persentase terlaksananya urusan kepegawaian secara efektif dan efisien	97%

Kegiatan

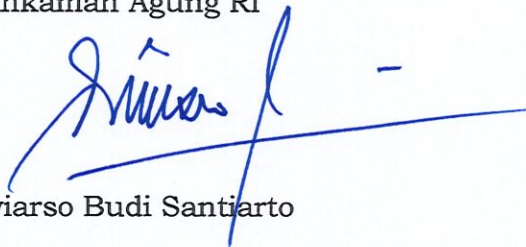
1. Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, dan Penanganan Pengaduan;
2. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya.

Anggaran

1. Rp 25.021.914.000,00
2. Rp 58.214.461.000,00

Pihak Kedua,

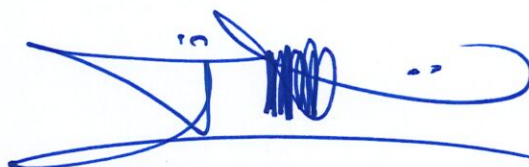
Ketua Kamar Pengawasan
Mahkamah Agung RI



Dwiwarso Budi Santiarso

Pihak Pertama,

Kepala Badan Pengawasan MA RI



Sugiyanto